

**PELAKSANAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAM PELAYANAN
KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT KOTA SEMARANG SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

OH, Rita Sri Hastuti

NIM 14.C2.0008

Kepada
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016

**PELAKSANAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAM PELAYANAN
KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT KOTA SEMARANG SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

OH, Rita Sri Hastuti
NIM 14.C2.0008

Kepada
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016

TESIS

**PELAKSANAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAM PELAYANAN
KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT KOTA SEMARANG SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN**

diajukan oleh

OH, Rita Sri Hastuti

NIM 14.C2.0008

telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H

Tanggal

Pembimbing Pendamping

Drs. Agus Prabowo, M.Sc., Apt

Tanggal

TESIS

**PELAKSANAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DALAM PELAYANAN
KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT KOTA SEMARANG SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

OH, Rita Sri Hastuti

NIM 14.C2.0008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

Dr. Endang Wahyati Y, S.H., M.H

dr.Hadi Sulistyanto, Sp.PD.,
M.HKes., FINASIM

Pembimbing Pendamping

Drs. Agus Prabowo, M.Sc., Apt

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan, atas berkat dan rahmatNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang. Penelitian berjudul “Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Kota Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Pekerjaan kefarmasian merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan dalam pekerjaan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bidang farmasi yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Untuk menunjang pelayanan kefarmasian maka pemerintah mengeluarkan ketentuan perundangan untuk mengatur kualifikasi tenaga kesehatan. Kualifikasi tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa kualifikasi tenaga kesehatan adalah minimal Diploma Tiga (DIII). Namun saat ini terdapat dua kualifikasi pada TTK yang melaksanakan praktik kefarmasian yaitu TTK berkualifikasi SMK dan TTK berkualifikasi Diploma Tiga (DIII).

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

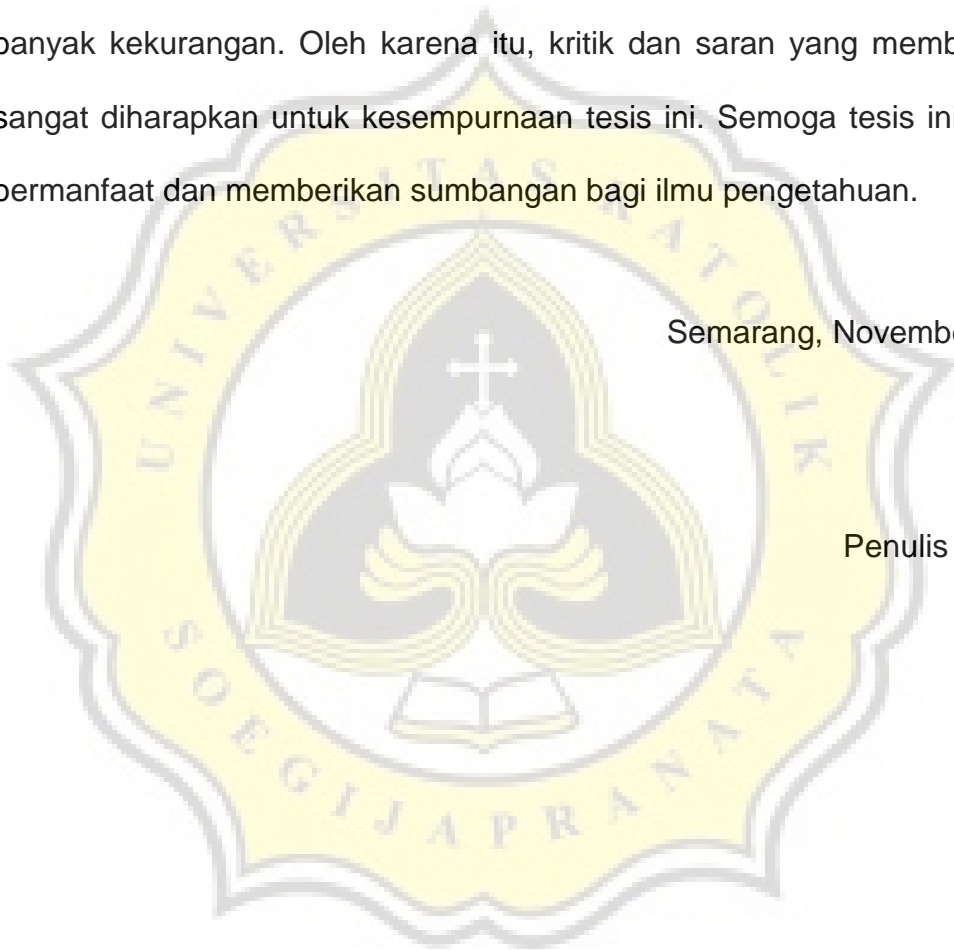
1. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang
2. Dr. Lindayani, M.Sc., Dekan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S., S.H., C.N., Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang
4. Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang dan Pembimbing Utama yang telah menyisihkan sebagian waktu, tenaga dan ilmunya yang berharga untuk memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingan dengan sabar hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Drs. Agus Prabowo, M.Sc., Apt., Pembimbing Pendamping yang telah menyisihkan sebagian waktu, tenaga dan ilmunya yang berharga untuk memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingan dengan sabar hingga terselesaikannya tesis ini.
6. dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., M.HKes., FINASIM, penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan, saran dan masukan yang sangat membangun dalam memperbaiki tesis ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, penyusunan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

Semarang, November 2016

Penulis



DAFTAR ISI

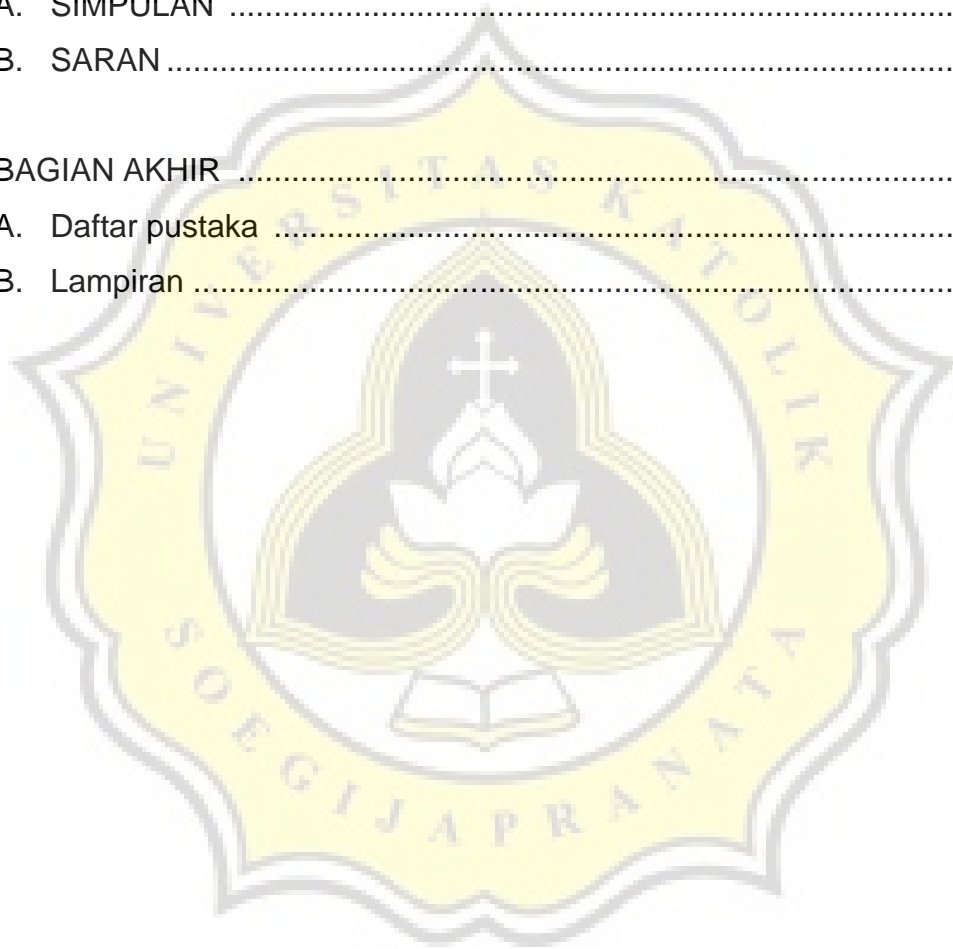
	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
HALAMAN PERNYATAAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Kerangka pemikiran	8
1. Kerangka konsep	9
2. Kerangka teori	10
F. Metode penelitian	13
1. Metode pendekatan	13
2. Spesifikasi penelitian	14
3. Jenis data	14
4. Metode pengumpulan data	15
5. Metode sampling	17
6. Metode penyajian data	18

7. Metode analisis data	19
G. Penyajian tesis	20
H. Jadwal Penelitian	21
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pelayanan kesehatan	22
1. Pengertian	22
2. Upaya dalam pelayanan kesehatan	23
3. Asas dan tujuan pelayanan kesehatan.....	24
4. Hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan	25
B. Fasilitas kesehatan	26
1. Pengertian	26
2. Jenis, pelayanan, penyelenggaraan dan Perizinan	26
3. Kewajiban fasilitas kesehatan	27
4. Kompetensi manajemen di fasilitas kesehatan	27
C. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit	28
1. Pengertian	28
2. Jenis-jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit	29
3. Perizinan tenaga kesehatan di Rumah Sakit.....	30
4. Kualifikasi dan kewenangan	32
D. Rumah Sakit	32
1. Pengertian	32
2. Tugas, peran dan fungsi Rumah Sakit	34
3. Jenis-jenis Rumah Sakit	35
4. Tugas penyelenggaraan Rumah Sakit	37
5. Tanggung jawab Rumah Sakit	38
E. Pelayanan kefarmasian	39
1. Pengertian	39
2. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian	40
3. Pekerjaan kefarmasian	40
F. Tenaga kefarmasian	41

1. Pengertian	41
2. Jenis-jenis tenaga kefarmasian	41
3. Kewenangan	42
G. Instrumen yuridis pemerintahan	42
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran umum obyek penelitian	45
a. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	45
b. Rumah Sakit Umum William Booth	56
c. Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto	63
2. Hasil Wawancara dengan narasumber	69
a. Bagian Penjamin Mutu	69
1) Bagian Penjamin Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo.....	69
2) Bagian Penjamin Mutu Rumah Sakit Umum William Booth	70
3) Bagian Penjamin Mutu Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto	71
b. Kepala Instalasi Farmasi	73
1) Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	73
2) Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum William Booth	75
3) Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto.....	77
c. Tenaga Teknis Kefarmasian	79
1) Tenaga Teknis Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	80
a) TTK lulusan SMK	80
b) TTK lulusan DIII	81
2) Tenaga Teknis Kefarmasian Rumah Sakit Umum William Booth	82

a) TTK lulusan SMK	83
b) TTK lulusan DIII	84
3) Tenaga Teknis Kefarmasian Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto.....	85
a) TTK lulusan SMK	86
b) TTK lulusan DIII	87
B. Pembahasan	88
1. Pengaturan	
Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Kota Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.....	89
a. Dasar Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Kota Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	89
b. Bentuk Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Kota Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	96
c. Tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Kota Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	101
2. Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian	102
a. Tenaga Pelaksana	102
b. Kualifikasi Tenaga Pelaksana	103
c. Prosedur Pelaksanaan	104
d. Ruang Lingkup Pelayanan	106

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	107
a. Teknis	108
b. Yuridis	109
c. Sosial	109
 BAB IV. PENUTUP	 111
A. SIMPULAN	111
B. SARAN	114
 BAGIAN AKHIR	 116
A. Daftar pustaka	116
B. Lampiran	119



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Daftar Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo.....	47
Tabel II. Jumlah Sarana dan Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	49
Tabel III. Data usia dan Masa Kerja Narasumber Tenaga Teknis Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	53
Tabel IV. Daftar Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum William Booth	57
Tabel V. Jumlah Sarana dan Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum William Booth	58
Tabel VI. Data usia dan Masa Kerja Narasumber Tenaga Teknis Kefarmasian Rumah Sakit Umum William Booth	62
Tabel VII. Daftar Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto.....	64
Tabel VIII. Jumlah Sarana dan Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto	65
Tabel IX. Data usia dan Masa Kerja Narasumber Tenaga Teknis Kefarmasian Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Grafik Usia dan Masa Kerja TTK di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	54
Gambar 2. Grafik Usia dan Masa Kerja TTK di Rumah Sakit Rumah Sakit Umum William Booth	62
Gambar 3. Grafik Usia dan Masa Kerja TTK di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	119
Lampiran2. Surat Ijin Peneltian Rumah Sakit Umum William Booth	120
Lampiran3. Surat Ijin Penelitian Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto	121
Lampiran 4. Jawaban Penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	122
Lampiran 5. Jawaban Penelitian Rumah Sakit Umum William Booth	123
Lampiran6. Jawaban Penelitian Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto	124
Lampiran7. Daftar Pertanyaan Wawancara Narasumber	125
Lampiran8. Format Lembar Persetujuan Narasumber	129
Lampiran9. Data Hasil Wawancara	130
Lampiran 10. Blangko Standar Prosedur Operasional	141

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, OH, Rita Sri Hastuti, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 14.C2.0008,

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2016

OH, Rita Sri Hastuti

ABSTRAK

Rumah sakit adalah salah satu jenis fasilitas kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit diwujudkan dalam pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK). Ketentuan tentang tenaga kesehatan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan tenaga kesehatan haruslah berkualifikasi minimum Diploma Tiga (DIII). Peneliti ingin mengetahui apakah rumah sakit telah melaksanakan ketentuan tentang tenaga kesehatan karena saat ini beberapa TTK yang melakukan pelayanan kefarmasian masih berkualifikasi di bawah jenjang DIII.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bersifat deskriptif analitis dilakukan di kota Semarang dengan mengambil sampel lokasi di tiga rumah sakit. Metode sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Penelitian menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit setelah berlakunya undang-undang tenaga kesehatan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Adapun bentuk Pengaturan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Kewenangan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam hal ini apoteker dan TTK yang berkualifikasi minimal DIII. Dalam pelaksanaan di rumah sakit ada tiga aspek yaitu tenaga pelaksana, kualifikasi pelaksana dan prosedur pelaksanaan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dipengaruhi faktor teknis yaitu sebagian TTK belum berkualifikasi DIII, pada RSUD Tugurejo 33%, RSUD Willam Booth 37%, RS Pantiwilasa Dr.Cipto 77%. Faktor yuridis yaitu pendelegasian wewenang yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan faktor sosiologis yaitu minat TTK untuk melanjutkan studi.

Kata kunci: pekerjaan kefarmasian, tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian, rumah sakit

ABSTRACT

A hospital was one of the health facilities having many kind of services, including pharmaceutical services. A pharmaceutical service was part of pharmaceutical work done by a pharmacist and his or her assistants. The regulation on health workers was revised by the Act Nr. 36 of 2014 on Health Workers mentioning that a health worker should have a Diploma III qualification at minimum. The researcher needs to know whether hospitals had implemented the regulation on health workers because for the time being some assistants conducting the services remain having qualification under diploma III.

This research uses a qualitative method and socio-legal approach. It is analytical-descriptive research that was conducted at Semarang by having location samples of three hospitals. The sampling technique used was purposive sampling. This research used field studies and literature study as well and the gathered data were then qualitatively analyzed by using the relevant legislations.

The implementation of the pharmaceutical services in hospitals after the enactment of the Act on Health Workers was based on the Indonesian Constitution, UUD 1945, the Act of Nr. 36 of 2009 on Health, the Act Nr. 44 of 2009 on Hospital, and the Act Nr. 36 of 2014 on Health Workers. The regulation forms were then included in Government's Regulation (PP) Nr. 51 of 2009 on Pharmaceutical Works and Minister of Health's Regulation Nr. 58 of 2014 on Pharmaceutical Service Standard at Hospital. The authority of pharmaceutical work was owned by health workers, namely pharmacists and the assistants having Diploma III qualification at minimum. The implementation in hospitals covered three aspects, namely human resource, qualification, and the procedure of the implementation. The three aspects, as a matter of fact, had not been fully accomplished. It was caused by technical, juridical, and sociological factors. The technical factor was the fact that some assistants had not obtained Diploma III qualification, particularly at RSUD Tugurejo (33%), RSU William Booth (37%), and RS Panti Wilasa Dr. Cipto (77%) whereas the juridical factor was about the authority delegation that was not regulated in the Minister of Health's Regulation Nr. 58 of 2014 on Pharmaceutical Service Standard at Hospital. The sociological factor was about the interest of the assistants to have a further study.

Keyword: pharmaceutical work, health worker, pharmacist, hospital